

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Agar dapat menggambarkan akuntabilitas kinerja, maka perlu diketahui capaian kinerja organisasi dengan cara membandingkan antara target dan realisasi serta membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini diuraikan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan indikator-indikator yang telah disusun dalam penetapan kinerja.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 diukur dengan maksud untuk mengetahui keberhasilan Dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Indikator yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2025 diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%).

Tabel 3.1
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian Tahun 2025			
			Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,83	69,88	98,66
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	84.700.000	88.900.117	104,95
2.	Meningkatnya Iklim Ketenagakerjaan yang kondusif Dalam Hubungan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	%	70	72,6	103,71
3.	Terciptanya Pemantapan Transmigran	Nilai rata-rata Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang Direvitalisasi	%	57,35	61,01	106,38

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun serta Capaian Kinerja Tahun ini, Tahun Lalu dan Beberapa Tahun

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,77	69,31	70,72	70,82	69,88
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	78.093.626	80.070.867	82.044.397	84.623.111	88.900.117
2.	Meningkatnya Iklim Ketenagakerjaan yang kondusif Dalam Hubungan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	%	NA	NA	NA	NA	72,6
3.	Terciptanya Pemantapan Transmigran	Nilai rata-rata Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang Direvitalisasi	%	58,11	55,48	57,23	61,01	61,01

Dari Tabel 3.2. diatas, capaian kinerja masing-masing sasaran pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Persentase Penduduk Usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan dibandingkan total penduduk usia kerja.

TPAK digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur pasokan tenaga kerja dan potensi partisipasi ekonomi di suatu wilayah, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan partisipasi yang lebih besar dalam pasar kerja. Variabel untuk menyusun indikator ini diperoleh dari Sakernas dan Sensus Penduduk yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

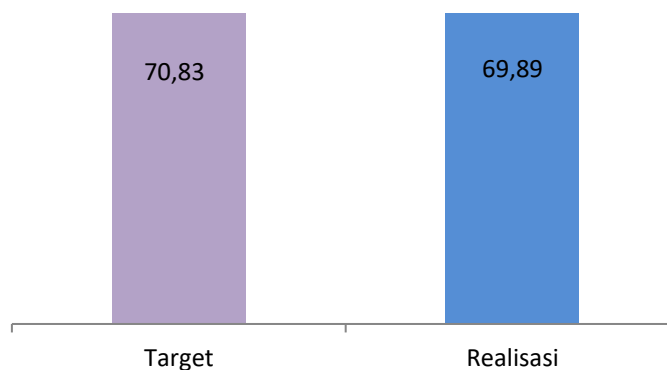
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Agustus 2025 sebesar 69,88 persen, turun 0,94 persen poin dibanding 2024 yang sebesar 70,82 persen terjadi peningkatan sebesar 0,10% dibanding tahun 2023 yang sebesar 70,72% terjadi peningkatan dibanding tahun 2022 sebesar 68,77 persen tahun 2021.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Indikator Kinerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	70,83	69,88	98,66

Grafik 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2025
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2025
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator Kinerja	Satuan	Targ et 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realis asi 2022	Targ et 2023	Realiasi 2023	Target 2024	Re alia si 202 4	Target 2025	Realisas i 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tingkat Partisipa si Angkatan Kerja	%	NA	68,77	NA	69,31	NA	70,72	NA	70 ,8 2	70,83	69,88

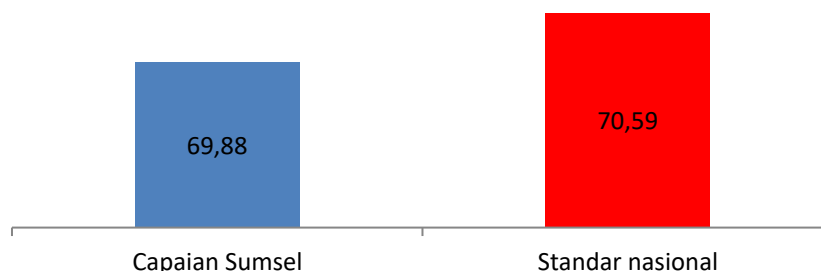
Indikator ini merupakan indikator baru sehingga belum ada target tahun 2021-2024.

▪ **Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional**

Perbandingan capaian indikator tahun 2025 terhadap standar Nasional dapat dilihat pada grafik ini:

Grafik 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Sumsel dan Standar Nasional Tahun 2025



Capaian Kinerja untuk indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Sumatera Selatan apabila dibandingkan dengan capaian Nasional masih berada dibawah capaian nasional, capaian sumsel pada tahun 2025

sebesar 69,88 persen, lebih rendah dari Nasional yang sebesar 70,59 persen. Capaian sumsel ini di level Nasional berada pada posisi

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.**

Indikator TPAK ini tidak tercapai karena pertambahan penduduk lebih besar dari pertambahan Angkatan Kerja. Penduduk Usia Kerja (PUK) merupakan semua orang berumur 15 Tahun ke atas. PUK cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Sumatera Selatan. PUK pada Agustus 2025 sebanyak 6.675,76 ribu orang, bertambahnya sebanyak 96,03 ribu orang dibandingkan Agustus 2024. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yang mencapai 4.492,57 ribu orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 2.010,82 ribu orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2025 terdiri dari 4.492,57 ribu orang penduduk bekerja dan 172,36 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2024, jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja, masing-masing bertambah sebanyak 5,13 ribu orang dan 12,47 ribu orang, sedangkan pengangguran turun 7,35 ribu orang.

▪ **Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya**

Pada tahun 2025 Realisasi keuangan anggaran sebesar Rp. 28.081.972.871 dari pagu anggaran yang sebesar Rp. 30.266.982.124 atau 92,78 persen dan realisasi fisik 100 persen.

Adapun penyesuaian anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 2.983.610.876., semula pada APBD Induk 2025 anggaran Disnakertrans sebesar Rp. 33.250.593.000 menjadi Rp. 30.266.982.124 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk Indikator TPAK ini didukung oleh program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja yaitu :

Tabel 3.5

N o	Sasaran	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Anggaran
1	2	3	4	5		
1	Terserapnya Tenaga kerja dipasar kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	Rp.340.000.000	Rp.319.307.875	93,91 %
			- Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kompetensi	Rp.240.000.000	Rp.219.757.875	91,57%
			- Pengadaan sarana pelatihan kerja	Rp.100.000.000	Rp.99.550.000	99,55%
2.		Program Penempatan tenaga Kerja		Rp.333.750.000	Rp. 328.135.120	98,32%
			1 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kab/Kota	Rp.13.750.000	Rp.11.649.999	84,73%
			2 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp. 225.000.000	Rp.224.340.884	99,71%
			3 Perlindungan PMI (Pra dan Purna penempatan di Daerah Provinsi)	Rp.50.000.000	Rp.47.674.998	95,35%
			4 Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, lokasi kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp.45.000.000	Rp.44.469.239	98,82%

▪ **Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Pernyataan Kinerja**

Pada Tahun 2025 target Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak tercapai, untuk itu Provinsi Sumatera Selatan akan terus meningkatkan angka TPAK semaksimal mungkin. Hambatan yang dihadapi pada Tahun 2025 yaitu pertumbuhan Penduduk Sumsel lebih besar dari Pertumbuhan Angkatan Kerja. target peningkatan TPAK tentunya membawa konsekuensi terhadap program-program yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun depan. Program-program ketenagakerjaan terus diarahkan dengan mendidik tenaga terampil dan menciptakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada perluasan kesempatan kerja, sehingga pengurangan pengangguran dari tahun ke tahun dapat direalisasikan.

Program-program yang terus akan dilaksanakan adalah program pelatihan yang mendukung peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja yaitu Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan beberapa kegiatan antara lain :

1. Pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi
2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
3. Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi Kerja dalam satu Daerah Provinsi

Pada tahun yang akan datang, untuk mempercepat pertemuan antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Melaksanakan program peningkatan kesempatan kerja

1. Bursa Kersa (Job Fair)
2. Pelatihan Berbasis Kompetensi

Selain Melaksanakan program-program tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan pro rakyat yang berdampak pada penyerapan/penempatan tenaga kerja.

2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

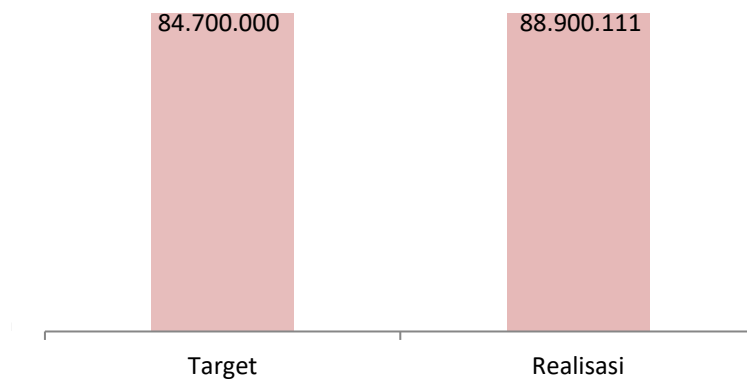
Tabel 3.6

Indikator Kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaian

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	84.700.000	88.900.117	104,95

Grafik 3.3

Perbandingan Realisasi Target tahun 2025 Tingkat Produktivitas Tenaga kerja



Tabel 3.7

**Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat produktivitas Tenaga kerja
Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025**

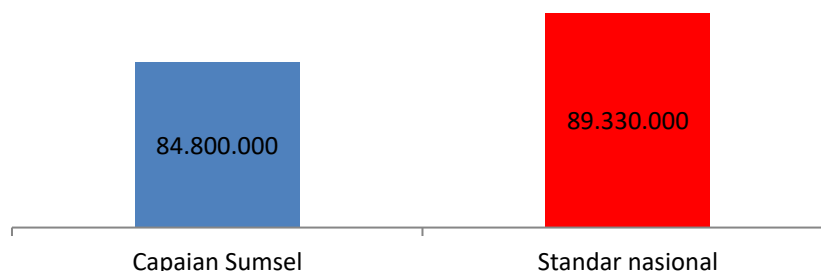
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	NA	78.093.626	NA	80.070.867	NA	82.044.397	80.000.000	84.623.111	84.700.000	88.900.117

- Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional**

Perbandingan capaian indikator tahun 2025 terhadap standar Nasional dapat dilihat pada grafik ini:

Grafik 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Sumsel dan Standar Nasional Tahun 2025



Capaian Kinerja untuk indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Selatan apabila dibandingkan dengan capaian Nasional masih dibawah capaian nasional, capaian sumsel pada tahun 2025 sebesar 88.900.117, lebih rendah dari Nasional yang sebesar 89.330.000.

- Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.**

Peningkatan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja disebabkan meningkatnya PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2024 PDRB ADHK sebesar 379 triliun dan pada tahun 2025 menjadi sebesar 399 triliun.

Untuk penduduk yang bekerja mengalami peningkatan, pada Tahun 2024 sebesar 4.480.100 dan pada tahun 2025 menjadi 4.492.570.

- **Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya**

Pada tahun 2025 Realisasi keuangan anggaran sebesar Rp. 28.081.972.871 dari pagu anggaran yang sebesar Rp. 30.266.982.124 atau 92,78 persen dan realisasi fisik 100 persen.

Adapun penyesuaian anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 2.983.610876., semula pada APBD Induk 2025 anggaran Disnakertrans sebesar Rp. 33.250.593.000 menjadi Rp. 30.266.982.124 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- **Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Pernyataan Kinerja**

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja terus ditingkatkan semaksimal mungkin. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu kegiatan yang bisa mendorong peningkatan ekonomi Sumatera Selatan. Yang mencakup 17 lapangan usaha:

1. Pertanian, Kehutanan dan Pertanian
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

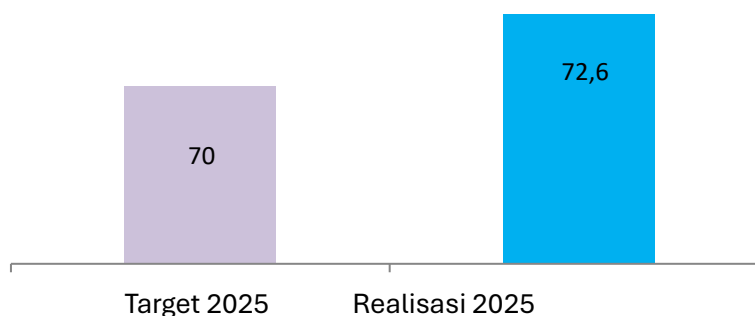
17. Jasa lainnya

3. Persentase Tenaga Kerja yang terlindungi Hak-Hak Dasarnya

Untuk tahun 2025 target Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi hak-hak dasarnya sebesar 70 persen.

Perbandingan target dan realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.5
Target dan Realisasi Tahun 2025
Indikator Persentase Tenaga Kerja yang terlindungi Hak-Hak Dasarnya



Tabel 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Tenaga Kerja yang
terlindungi Hak-Hak Dasarnya Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025

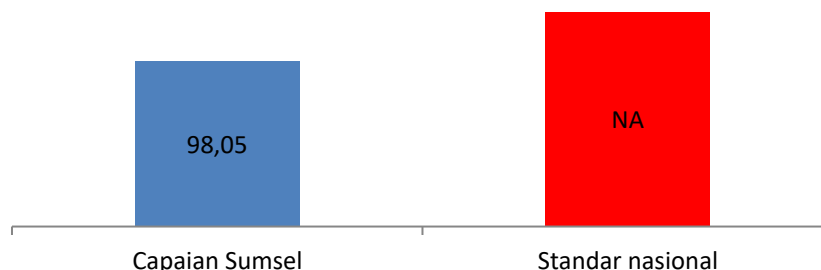
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-hak Dasarnya	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	70	72,6

Indikator ini merupakan indikator baru sehingga belum ada target dan capaian tahun 2021-2024.

- **Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional**

Perbandingan capaian indikator tahun 2025 terhadap standar Nasional dapat dilihat pada grafik ini:

Grafik 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Sumsel dan Standar Nasional Tahun 2025



Capaian Kinerja untuk indikator Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi hak-hak dasarnya di Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan. Data belum bisa dibandingkan dengan standar nasional karena data nasional belum diperoleh.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.**

Penyebab Peningkatan Capaian Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi hak-hak dasarnya antara lain:

1. Meningkatnya Pembinaan terhadap perusahaan untuk mendaftarkan PP/PKB
2. Meningkatnya Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaan untuk Memastikan Tenaga Kerja Terlindungi hak-hak dasarnya

Hak-hak Dasar Tenaga Kerja antara lain:

1. Ha katas Upah yang layak
2. Ha katas WAKTU Kerja dan Istirahat
3. Ha katas Jaminan Sosial
4. Hak ATAS Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5. Hak Berserikat
6. Ha katas Pesangon (jika terjadi PHK)

- **Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya**

Pada tahun 2025 Realisasi keuangan anggaran sebesar Rp. 28.081.972.871 dari pagu anggaran yang sebesar Rp. 30.266.982.124 atau 92,78 persen dan realisasi fisik 100 persen.

Adapun penyesuaian anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 2.983.610.876., semula pada APBD Induk 2025 anggaran Disnakertrans sebesar Rp. 33.250.593.000 menjadi Rp. 30.266.982.124 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- **Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Pernyataan Kinerja**

Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi hak-hak dasarnya terus ditingkatkan semaksimal mungkin, target peningkatan Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi hak-hak dasarnya tentunya membawa konsekuensi terhadap program-program yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun depan. Program-program ketenagakerjaan terus diarahkan untuk melindungi hak-hak dasar Tenaga Kerja

Program-program yang terus akan dilaksanakan adalah program yang mendukung peningkatan Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi hak-hak dasarnya antara lain :

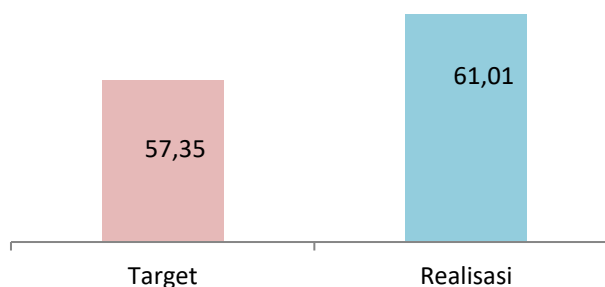
1. Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial
2. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit
3. Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Sektorial Provinsi, Upah Minimum Kab/Kota, dan Upah Minimum Sektorial Kab/Kota
4. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
5. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan
6. Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Perusahaan

4. Nilai rata-rata Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang Direvitalisasi

Untuk tahun 2025 target Nilai rata-rata Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang Direvitalisasi sebesar 57,35, untuk realisasi masih menggunakan data capaian tahun 61,01. Dikarenakan pada tahun 2025 Kementerian Transmigrasi tidak melakukan perhitungan capaian Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Prioritas Nasional yang Direvitalisasi.

Perbandingan target dan realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.7
Target dan Realisasi Tahun 2025
Indikator Nilai rata-rata Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi
Prioritas Nasional yang Direvitalisasi



Tabel 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi Nilai rata-rata Indeks Perkembangan
52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang Direvitalisasi
Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025

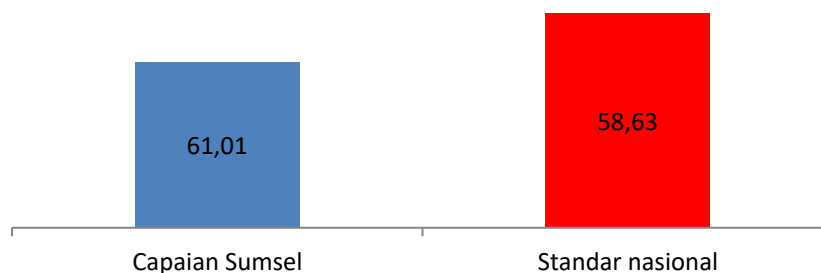
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nilai rata-rata Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang Direvitalisasi	Per sen	NA	58,11	NA	55,48	NA	57,23	NA	61,01	57,35	61,01 (masih menggunakan data realisasi 2024 karena Tahun 2025 Kementerian Transmigrasi tidak mengukur capaian)

Indikator ini merupakan indikator baru sehingga belum ada target tahun 2021-2024.

- **Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional**

Perbandingan capaian indikator tahun 2025 terhadap standar Nasional dapat dilihat pada grafik ini:

Grafik 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Sumsel dan Standar Nasional Tahun 2025



Capaian Kinerja untuk indikator Nilai rata-rata Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang Direvitalisasi di Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan, apabila dibandingkan dengan capaian Nasional masih berada diatas capaian nasional, capaian sumsel pada tahun 2025 sebesar 61,01 indeks, lebih baik dari Nasional yang sebesar 58,63 indeks.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.**

Capaian nilai rata-rata Indeks perkembangan 52 kawasan Transmigrasi berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Untuk tahun 2025 capaian belum tidak tersedia karena Kementerian terkait tidak melakukan pengukuran sehingga data yang digunakan adalah data capaian tahun 2024. Penetapan hasil evaluasi ini diukur berdasarkan dimensi ekonomi, sosial budaya, lingkungan, jejaring prasarana dan sarana, serta kelembagaan.

Capaian Sumatera Selatan sebagai berikut:

N O	Nama Kawasan	Dimensi	Hasil Pengukuran Tahun 2024			
			Indeks Dimensi	Indeks Kompos it	IPK Trans	Status
1.	Telang	Ekonomi	69.76	27.35	78.67	Berday a Saing
		Sosial Budaya	80.79	10.53		
		Lingkungan	94.73	7.32		
		Jejaring	83.06	23.50		
		Prasarana dan Sarana				
		Kelembagaan	84.79	9.97		
2.	Parit Rambutan	Ekonomi	51.70	20.27	59.28	Mandiri
		Sosial Budaya	42.47	5.53		
		Lingkungan	45.03	3.48		
		Jejaring	59.21	16.75		
		Prasarana dan Sarana				
		Kelembagaan	34.71	4.08		
3.	Kikim	Ekonomi	53.29	20.89	54.25	Mandiri
		Sosial Budaya	70.78	9.22		
		Lingkungan	48.54	3.75		
		Jejaring	53.97	15.27		
		Prasarana dan Sarana				
		Kelembagaan	43.57	5.12		

- **Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya**

Pada tahun 2025 Realisasi keuangan anggaran sebesar Rp. 147.328.229 dari pagu anggaran yang sebesar Rp. 162.733.800 atau 92,78 persen dan realisasi fisik 100 persen.

Adapun penyesuaian anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 297.266.200, semula pada APBD Induk 2025 anggaran Disnakertrans sebesar Rp. 460.000.000 menjadi Rp. 162.733.800 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- **Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Pernyataan Kinerja**

Nilai rata-rata Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang Direvitalisasi terus ditingkatkan semaksimal mungkin.

Program-program ketransmigrasian terus diarahkan meningkatkan dimensi ekonomi, sosial budaya, lingkungan, jejaring prasarana dan sarana serta kelembagaan.

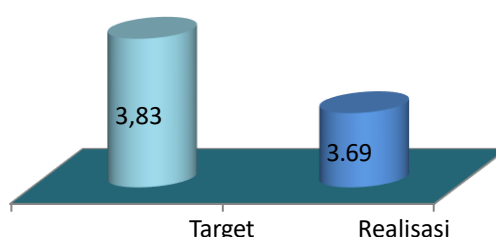
Program-program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Nilai rata-rata Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang Direvitalisasi antara lain sebagai berikut :

1. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
2. Penataan Pesebaran Penduduk
3. Penyuluhan Transmigrasi
4. Pelatihan Transmigrasi
5. Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi
6. Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi
7. Pengembangan Satuan Permukiman pada tahap Pemantapan

- **Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target RPJMD yang terdapat Pada Renstra Disnakertrans**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,82-3,93	3,69	103,40

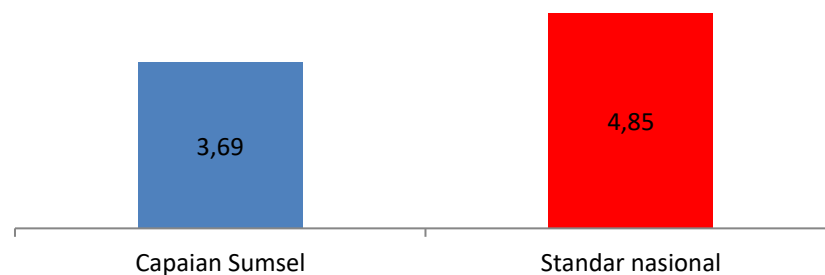
Grafik 3.9
Proyeksi dan Realisasi tahun 2025
Indikator Kinerja Tingkat pengangguran Terbuka



Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,82-3,93 persen dengan realisasi sebesar 3,69 persen atau capaian sebesar 103,40%. hal ini menunjukkan capaian yang baik melampaui persentase yang telah ditargetkan.

- **Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional**

Perbandingan capaian indikator tahun 2025 terhadap standar Nasional dapat dilihat pada grafik ini:



Capaian Kinerja untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan, apabila dibandingkan dengan capaian Nasional masih berada diatas capaian nasional, capaian sumsel pada tahun 2025 sebesar 3,69 persen, lebih baik dari Nasional yang sebesar 4,85 persen.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.**

Keberhasilan menurunkan pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja di Sumatera Selatan ini merupakan akumulasi beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pasca Covid 19 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan upaya untuk memulihkan kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Selatan. Program-program ketenagakerjaan terus diarahkan dengan mendidik tenaga terampil dan menciptakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada perluasan kesempatan kerja, sehingga pengurangan pengangguran dari tahun ke tahun dapat direalisasikan. Program-program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengurangan pengangguran antara lain sebagai berikut :

1. Pelatihan untuk pengembangan skill.
2. Pelatihan Wirausaha Baru, Peningkatan Produktivitas, dan Bimbingan Konsultasi kepada UMKM untuk mewujudkan UMKM yang berkembang sehingga dapat memperluas kesempatan kerja.
3. Pemagangan Dalam dan Luar Negeri yang bertujuan untuk menjadikan para peserta magang menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Tenaga kerja magang yang bekerja dengan sangat baik maka pihak perusahaan disarankan untuk merekrutnya sebagai karyawan tetap.
4. Penempatan Tenaga Kerja AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara).
5. Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal.
6. Pengelolaan informasi pasar kerja melalui kegiatan Job Fair dan aplikasi Cari Kerja.

- **Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya**

Pada tahun 2025 Realisasi keuangan anggaran sebesar Rp. 28.081.972.871 dari pagu anggaran yang sebesar Rp. 30.266.982.124 atau 92,78 persen dan realisasi fisik 100 persen.

Adapun efisiensi penyesuaian anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 2.983.610.876., semula pada APBD Induk 2025 anggaran Disnakertrans sebesar Rp. 33.250.593.000 menjadi Rp. 30.266.982.124 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Efisiensi ini berasal dari anggaran Perjalanan Dinas, Alat Tulis Kantor, Baju Dinas, Cetak dan Penggandaan.

- **Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Pernyataan Kinerja**

Tingkat Kesempatan Kerja terus ditingkatkan semaksimal mungkin, target peningkatan kesempatan kerja tentunya membawa konsekuensi terhadap program-program yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun depan. Program-program ketenagakerjaan terus diarahkan dengan mendidik tenaga terampil dan menciptakan kegiatan-kegiatan yang

mengarah kepada perluasan kesempatan kerja, sehingga pengurangan pengangguran dari tahun ke tahun dapat direalisasikan.

Program-program yang terus akan dilaksanakan adalah program pelatihan yang mendukung peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja yaitu Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan beberapa kegiatan antara lain :

1. Pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi
2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
3. Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi Kerja dalam satu Daerah Provinsi

Pada tahun yang akan datang, untuk mempercepat pertemuan antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Melaksanakan program peningkatan kesempatan kerja

1. Bursa Kerja (Job Fair)
2. Pelatihan Berbasis Kompetensi

Selain Melaksanakan program-program tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan pro rakyat yang berdampak pada penyerapan/penempatan tenaga kerja.

B REALISASI ANGGARAN

Dalam menunjang kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 didukung Dana APBD, dengan uraian sebagai berikut :

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Anggaran
1	2	3	4	5		
1	Terserapnya Tenaga kerja dipasar kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Pelaksanaan latihan kerja berdasarkan kluster kompetensi	Rp.340.000.000	Rp.319.307.875	93,91 %
			- Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kompetensi	Rp.240.000.000	Rp.219.757.875	91,57%
			- Pengadaan sarana pelatihan kerja	Rp.100.000.000	Rp.99.550.000	99,55%
2.				Rp.333.750.000	Rp. 328.135.120	98,32%
			1 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kab/Kota	Rp.13.750.000	Rp.11.649.999	84,73%
		Program Penempatan tenaga Kerja	2 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp. 225.000.000	Rp.224.340.884	99,71%
			3 Perlindungan PMI (Pra dan Purna penempatan di Daerah Provinsi)	Rp.50.000.000	Rp.47.674.998	95,35%
			4 Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, lokasi kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp.45.000.000	Rp.44.469.239	98,82%
3.				Rp.166.762.000	Rp. 136.297.928	81,73%
	Meningkatnya Kondisi Hubungan kerja yang harmonis	Program Hubungan Industrial				
			1 Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan	Rp. 73.612.000	Rp. 48.723.184	66,19%

			Penutupan yang Berakibat/ Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			
		2	Penetapan Upah Minimu (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Rp. 93.150.000	Rp. 87.574.744	94,01%
4	Program Pengawasan Ketenagakerjaan			Rp.317.936.000	Rp. 249.899.959	78,60%
		1	Penyelenggaraan Pengawas Ketenagakerjaan	Rp.317.936.000	Rp.249.899.959	78,6%
5	Program Pembangunan Transmigrasi	1.	Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten / Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 133.368.300	Rp. 130.106.229	97.55%
6	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Rp. 29.365.500	Rp. 17.222.000	58,65%
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 120.000.000	Rp. 119.512.111	99,59%
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 26.448.151.000	Rp. 24.656.563.644	93,23%
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 40.000.000	Rp. 34.339.168	85,85%
		4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 100.000.000	Rp. 64.877.629	64,88%
		5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 411.819.547	Rp. 381.449.724	92,63%
		6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp. 20.000.000	Rp. 19.980.000	99,90%

			Pemerintah Daerah			
		7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.025.000.000	Rp. 851.625.954	83,09%
		8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 780.829.777	Rp. 772.655.530	98,95%
			TOTAL	Rp. 30.266.982.124	Rp. 28.081.972.871	92,78%